

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sektor pariwisata telah diakui secara global sebagai salah satu sektor yang memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Industri pariwisata merupakan sektor strategis dalam pembangunan perekonomian Indonesia. Sektor ini memiliki peran penting dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan negara, serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Sektor pariwisata memiliki kaitan erat dengan sektor lain, seperti transportasi, akomodasi, kuliner, kerajinan, dan jasa lainnya. Hal ini diperkuat menurut Wahab (2003) yang menjelaskan bahwa industri pariwisata mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang cepat mengingat dengan berkembangnya industri pariwisata, maka akan tercipta lapangan kerja yang baru sehingga mampu meningkatkan standar hidup masyarakat dan juga menstimulasi sektor-sektor produktivitas lainnya. Potensi Indonesia dalam mengembangkan industri pariwisata sangatlah besar, dikarenakan Indonesia merupakan negara kepulauan. Selain itu, Handayani dkk (2013) menyebutkan sub sektor pariwisata pada saat ini merupakan sumber penerimaan negara yang sangat diandalkan setelah penerimaan negara dari minyak bumi dan alam yang kian merosot.

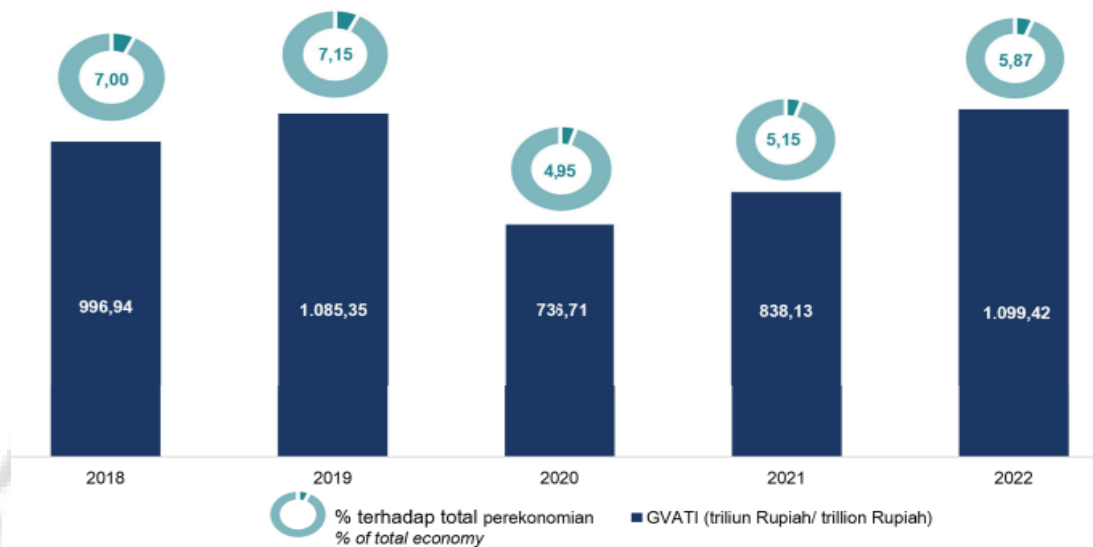
Industri pariwisata dapat diharapkan menjadi penggerak dalam mengatasi masalah perekonomian dalam suatu negara (Skuflic dan Stokovic, 2011). Pariwisata dianggap mampu mendorong pembangunan wilayah yang mempunyai potensi daya tarik wisata melalui pertumbuhan ekonomi karena berpengaruh terhadap tiga aspek, yaitu aspek ekonomis, aspek sosial dan aspek budaya (Yakup

& Haryanto, 2019). Setiap biaya yang dikeluarkan wisatawan selama beraktifitas di daerah tujuan wisata, dapat memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara (Angappapillai, 2013).

Hal ini sejalan dengan teori *Tourism-Led Growth Hypothesis* oleh Balaguer dan Cantavella (2002) dan Dritsakis (2004) yang menyatakan bahwa sektor pariwisata dapat menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Teori ini menyatakan bahwa peningkatan kunjungan wisatawan, baik domestik maupun internasional, akan meningkatkan pendapatan nasional melalui berbagai saluran seperti peningkatan ekspor jasa, penciptaan lapangan kerja, dan investasi infrastruktur. Selain itu, pariwisata juga mendorong pembangunan sektor terkait seperti transportasi, akomodasi, makanan-minuman, dan kerajinan lokal melalui efek multiplier.

Pertumbuhan ekonomi dalam hal ini diproxy dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) khususnya sektor pariwisata merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi khusus pada sektor pariwisata (BPS, 2024). Dalam istilah internasional, PDRB sektor pariwisata sering disebut *Gross Value Added Tourism Industries* (GVATI).

GVATI merupakan indikator yang penting dalam menilai kontribusi industri pariwisata terhadap perekonomian suatu negara. Dalam kasus Indonesia, kontribusi GVATI menunjukkan tren yang cukup beragam selama beberapa tahun terakhir yang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kondisi ekonomi global, peristiwa pandemi, serta kebijakan dan strategi dalam pengembangan pariwisata (BPS *Indonesia Tourism Satellite Account*, 2024).



Gambar 1.1. Kontribusi GVATI terhadap Perekonomian Indonesia, 2018–2022

Berdasarkan Gambar 1.1. di atas diketahui bahwa sebelum pandemi, kontribusi GVATI terhadap perekonomian Indonesia berada pada kisaran 7 persen. Namun, saat pandemi COVID-19 melanda pada tahun 2020, kontribusi ini mengalami penurunan signifikan menjadi 4,95 persen, sesuai dengan dampak negatif yang dialami oleh sektor pariwisata di seluruh dunia akibat pembatasan perjalanan dan penurunan jumlah wisatawan. Perbaikan kondisi pariwisata Indonesia mulai terasa pada tahun 2022, yang ditandai dengan meningkatnya kontribusi pariwisata menjadi 5,87 persen. Hal ini mencerminkan adanya pemulihan dalam industri pariwisata setelah masa-masa sulit selama pandemi.

Meskipun kontribusi GVATI pada tahun 2022 meningkat dibandingkan dengan masa pandemi, tetapi masih belum mencapai level sebelum pandemi. Namun peningkatan ini menunjukkan potensi pemulihan lebih lanjut dalam industri pariwisata Indonesia dan memberikan harapan bagi pertumbuhan ekonomi di masa mendatang.

Pemerintah dalam terus mengambil langkah untuk perbaikan perekonomian Indonesia dan wujud perhatian pemerintah pada pemulihan sektor pariwisata

Indonesia pasca Covid-19 adalah dengan penancangan 5 destinasi pariwisata super prioritas di Indonesia oleh Bapak Sandiaga Uno (Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif) yakni Borobudur, Danau Toba, Likupang, Mandalika, Labuan Bajo. 5 destinasi itu mencakup 5 provinsi yang berbeda yaitu Jawa Tengah, Sumatera Utara, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Dasar hukum pengembangan Destinasi Super Prioritas (DSP) di Indonesia adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2011. PP ini mengatur rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional tahun 2010-2025 (<http://kemenparekraf.go.id>. di akses 20 Mei 2024).

Adapun perkembangan PDRB Sektor Pariwisata 5 Provinsi Destinasi Pariwisata Super Prioritas di Indonesia tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1. Perkembangan PDRB Sektor Pariwisata 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas di Indonesia Tahun 2018-2023

Tahun	PDRB Sektor Pariwisata									
	Sumatera Utara		Jawa Tengah		NTB		NTT		Sulawesi Utara	
	Milyar	%	Milyar	%	Milyar	%	Milyar	%	Milyar	%
2018	12131.74	-	30660.79	-	1575.04	-	492.78	-	1958.95	-
2019	13209.12	8.88	33442.26	9.07	1574.55	-0.03	524.49	6.43	2013.89	2.80
2020	11985.59	-9.26	30773.74	-7.98	1129.96	-28.24	381.71	-27.22	1494.17	-25.81
2021	11888.96	-0.81	32595.12	5.92	1145.24	1.35	399.79	4.74	1688.11	12.98
2022	12740.17	7.16	38132.45	16.99	1427.93	24.68	473.47	18.43	1898.27	12.45
2023	14054.57	10.32	42417.20	11.24	1556.05	8.97	524.19	10.71	2069.51	9.02

Sumber: Statistik Objek Daya Tarik Wisata (Data diolah, 2024)

Berdasarkan Tabel 1.1. di atas diketahui bahwa penurunan PDRB sektor pariwisata terekstrim terjadi dimasa Covid-19 tahun 2020, dari 5 destinasi pariwisata super prioritas Provinsi Nusa Tenggara Barat menurun 28,24 persen, selanjutnya Provinsi Nusa Tenggara Timur menurun sebesar 27,22 persen, dan Provinsi Sulawesi Utara menurun 25,81 persen. Sedangkan pada masa pemulihan pasca Covid 19 terjadi tren positif dengan peningkatan terekstrim terjadi pada tahun 2022 yakni Provinsi Nusa Tenggara Barat meningkat 24,68 persen, Provinsi

Nusa Tenggara Timur meningkat sebesar 18,43 persen, dan Provinsi Jawa Tengah meningkat 16,99 persen. Tentunya kedepan industri pariwisata semakin lama-semakin pesat. Menurut Woworuntu (2017) menyatakan bahwa industri pariwisata akan menjadi salah satu industri terbesar di dunia yang akan terus tumbuh seiring dengan kebutuhan perjalanan manusia.

Tentunya ada banyak faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi sektor pariwisata diantaranya adalah jumlah wisatawan, jumlah objek wisata, dan tingkat hunian kamar. Hal ini diperkuat dari beberapa pendapat ahli, diantaranya menurut Wijaya (2014) mengatakan bahwa jumlah kunjungan wisatawan merupakan indikator yang digunakan dalam mengukur pencapaian industri pariwisata dan mampu memberikan dampak terhadap masyarakat dan tentunya pemerintah dalam bentuk pendapatan sektor pariwisata. Menurut Sammeng, (2001) menjelaskan bahwa pengaruh industri pariwisata terhadap pembangunan ekonomi yang dimiliki suatu daerah atau negara masing-masing berbeda, tergantung potensi yang dimiliki oleh suatu daerah atau negara itu sendiri. Potensi suatu daerah yang berbeda menyebabkan jumlah objek wisata berbeda-beda. Menurut Austriana (2005) menyebutkan bahwa tingkat hunian hotel juga merupakan salah satu faktor penunjang dalam mempengaruhi pendapatan dari sektor pariwisata.

Menurut UU No. 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan, wisatawan adalah orang yang melakukan wisata. Wisatawan juga adalah orang-orang yang datang berkunjung pada suatu tempat atau negara, biasanya mereka disebut sebagai pengunjung (visitor) yang terdiri dari banyak orang dengan bermacam-macam motivasi kunjungan, termasuk didalamnya. Wisatawan adalah orang-orang yang

datang berkunjung pada suatu tempat atau negara, dengan bermacam-macam tujuan dalam waktu menginap minimal 24 jam dan maksimal yaitu enam bulan.

Naiknya jumlah wisatawan ini diduga meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Menurut Austriana, (2005) semakin lama wisatawan tinggal disuatu daerah tujuan wisata semakin banyak uang yang dibelanjakan didaerah tujuan wisata tersebut minimal untuk keperluan makan, minum dan penginapan. Berbagai macam kebutuhan wisatawan selama perjalanan wisata akan menimbulkan gejala konsumtif untuk produk-produk yang ada didaerah tujuan wisata. Kegiatan konsumtif wisatawan mancanegara dan domestik akan memperbesar pendapatan sektor pariwisata suatu daerah. Oleh karena itu, makin banyak jumlah wisatawan maka pendapatan sektor pariwisata akan meningkat.

Penelitian yang mengkaji jumlah wisatawan terhadap PDRB sudah pernah diteliti sebelumnya seperti Novitri, Junaidi, dan Safri (2014); Citra, Walewangko, dan Maramis (2023); Azhari (2018); Hutasoit, Harlen, dan Harahap (2017); Ramdhaniah, Sayuti, dan Asnidar (2022); Soputan, Kumenaung, dan Kawung (2022); Hasanah, dan Fadly (2019); dan Adrianur (2018) yang menyimpulkan bahwa jumlah wisatawan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun ternyata hal ini bertentangan dengan hasil riset Taupiqurrahman (2014); Alwi, Sasana dan Jalunggono (2019); Salsabilla, dan Setyowati (2023); dan Najmi, dan Syariani (2022) yang justru menyatakan bahwa jumlah wisatawan tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Tentunya *research gap* ini menjadi kajian yang menarik untuk mengkaji lebih lanjut antara jumlah wisatawan terhadap terhadap pertumbuhan ekonomi sektor

pariwisata khususnya di 5 (lima) provinsi destinasi pariwisata super prioritas Indonesia.

Selain jumlah wisatawan, faktor lain yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi sektor pariwisata adalah jumlah objek wisata. Objek wisata adalah sasaran wisata yang memiliki unsur fisik dominan yang menarik untuk dikunjungi wisatawan dengan berbagai daya tarik wisata sebagai sasaran wisata yang memiliki unsur abstrak dominan (UU No.10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan).

Naiknya jumlah objek wisata ini diduga meningkatkan PDRB sektor pariwisata. Hal ini sejalan dengan pendapat Yoeti (2008) yang menjelaskan bahwa Indonesia memiliki keindahan alam serta keanekaragaman budaya yang berpeluang untuk menjual keindahan alam dan atraksi budayanya kepada wisatawan mancanegara dan domestik. Kedatangan wisatawan akan menambah pendapatan bagi daerah yang dikunjungi, sedangkan bagi wisatawan mancanegara kedatangan mereka akan menambah devisa bagi negara.

Penelitian yang mengkaji jumlah objek wisata terhadap PDRB sudah pernah diteliti sebelumnya seperti Alwi, Sasana dan Jalunggono (2019) yang menyimpulkan bahwa jumlah objek wisata memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB. Namun ternyata hal ini bertentangan dengan hasil riset Adrianur (2018); dan Najmi, dan Syariani (2022) yang justru menyatakan bahwa jumlah objek wisata tidak berpengaruh signifikan terhadap PDRB. Tentunya *research gap* ini menjadi kajian yang menarik untuk mengkaji lebih lanjut antara jumlah objek wisata terhadap PDRB sektor pariwisata khususnya di 5 (lima) provinsi destinasi pariwisata super prioritas Indonesia.

Terakhir, selain jumlah wisatawan dan jumlah objek wisata, faktor lain yang diduga mempengaruhi PDRB adalah tingkat hunian kamar. Menurut Badrudin, (2001) yang menjelaskan bahwa tingkat hunian hotel merupakan suatu keadaan sampai sejauh mana jumlah kamar terjual, jika diperbandingkan dengan seluruh jumlah kamar yang mampu untuk di jual dengan tersedianya kamar hotel yang memadai, para wisatawan tidak segan untuk berkunjung ke suatu daerah.

Tingkat hunian kamar menjadi acuan dalam menilai keberhasilan suatu hotel (Amrita et al., 2021). Naiknya tingkat hunian kamar ini diduga meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hal ini sejalan dengan pendapat Badrudin, (2001) yang menjelaskan bahwa jika tingkat hunian kamar hotel tinggi, terlebih jika hotel tersebut nyaman untuk disinggahi. Para wisatawan akan merasa lebih aman, nyaman dan betah untuk tinggal lebih lama di daerah tujuan wisata tersebut. Oleh karena itu, industri pariwisata terutama kegiatan yang berkaitan dengan penginapan yaitu hotel, baik berbintang maupun melati akan memperoleh pendapatan yang semakin banyak apabila para wisatawan tersebut semakin lama menginap.

Penelitian yang mengkaji tingkat hunian kamar terhadap PDRB sektor pariwisata suatu daerah sudah pernah diteliti sebelumnya seperti Najmi, dan Syariani (2022); Alwi, Sasana dan Jalunggono (2019); Hasanah, dan Fadly (2019); Taupiqurrahman (2014); Bujung, Rotinsulu dan Niode (2019); Hutasoit, Harlen, dan Harahap (2017) yang menyimpulkan bahwa tingkat hunian kamar memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB. Namun ternyata hal ini bertentangan dengan hasil riset Ramdhaniah, Sayuti, dan Asnidar (2022); Azhari (2018); dan Citra, Walewangko, dan Maramis (2023) yang justru menyatakan

bahwa tingkat hunian kamar tidak berpengaruh signifikan terhadap PDRB. Tentunya *research gap* ini menjadi kajian yang menarik untuk mengkaji lebih lanjut antara tingkat hunian kamar terhadap terhadap PDRB sektor pariwisata khususnya di lima provinsi destinasi pariwisata super prioritas Indonesia.

Penelitian ini nantinya menggunakan regresi data panel yang harapannya bahwa hasil penelitian ini nantinya mampu menjelaskan keadaan model penelitian di kelima provinsi destinasi super prioritas tersebut. Berdasarkan uraian kesenjangan *gap research* dan gap data di atas, tentunya hal ini menjadi kajian menarik dalam sebuah rangkaian penelitian yang berjudul “**Analisis Dampak Sektor Pariwisata Terhadap PDRB: Studi Kasus Pada Destinasi Wisata 5 (Lima) Provinsi Destinasi Pariwisata Super Prioritas Indonesia**”.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Terjadi penurunan PDB sektor pariwisata Indonesia dimasa Covid 19.
2. Terjadi penurunan PDRB sektor pariwisata terburuk di 5 (lima) provinsi destinasi pariwisata super prioritas Indonesia pada tahun 2020.
3. Adanya *research gap* jumlah wisatawan dengan PDRB sektor pariwisata.
4. Adanya *research gap* jumlah objek wisata dengan PDRB sektor pariwisata.
5. Adanya *research gap* tingkat hunian kamar dengan PDRB sektor pariwisata.

1.3. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah ada pengaruh jumlah wisatawan terhadap PDRB sektor pariwisata di lima provinsi destinasi pariwisata super prioritas Indonesia?
2. Apakah ada pengaruh tingkat penghunian kamar terhadap PDRB sektor pariwisata di lima provinsi destinasi pariwisata super prioritas Indonesia?
3. Apakah ada pengaruh jumlah objek wisata terhadap PDRB sektor pariwisata di lima provinsi destinasi pariwisata super prioritas Indonesia?
4. Apakah ada pengaruh jumlah wisatawan, tingkat penghunian kamar, dan jumlah objek wisata terhadap PDRB sektor pariwisata di lima provinsi destinasi pariwisata super prioritas Indonesia?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh jumlah wisatawan terhadap PDRB sektor pariwisata di lima provinsi destinasi pariwisata super prioritas Indonesia.
2. Untuk menganalisis pengaruh tingkat penghunian kamar terhadap PDRB sektor pariwisata di lima provinsi destinasi pariwisata super prioritas Indonesia,
3. Untuk menganalisis pengaruh jumlah objek wisata terhadap PDRB sektor pariwisata di lima provinsi destinasi pariwisata super prioritas Indonesia.
4. Untuk menganalisis pengaruh jumlah wisatawan, tingkat penghunian kamar, dan jumlah objek wisata terhadap PDRB sektor pariwisata di lima provinsi destinasi pariwisata super prioritas Indonesia.

1.5. Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara teoritis penelitian ini

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya bidang ekonomi pariwisata dan pertumbuhan ekonomi daerah.
- b. Hasil penelitian ini dapat memperkaya literatur dan menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan dampak sektor pariwisata terhadap PDRB pada destinasi-destinasi wisata lainnya.

2. Manfaat secara praktis penelitian ini

- a. Bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah
 - 1) Memberikan informasi dan masukan yang berguna dalam perumusan kebijakan dan strategi pengembangan pariwisata yang lebih efektif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di 5 destinasi pariwisata super prioritas di Indonesia.
 - 2) Menjadi bahan pertimbangan dalam mengalokasikan anggaran dan sumberdaya untuk pengembangan sektor pariwisata yang dapat memberikan dampak optimal bagi perekonomian daerah.
- b. Bagi pelaku usaha di sektor pariwisata
 - 1) Memberikan gambaran mengenai peluang dan potensi pengembangan usaha pariwisata yang dapat mendukung ekonomi daerah.
 - 2) Menjadi pertimbangan dalam merumuskan strategi dan inovasi untuk meningkatkan daya saing dan kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian daerah.
- c. Bagi masyarakat lokal

- 1) Meningkatkan kesadaran dan apresiasi masyarakat terhadap pentingnya sektor pariwisata dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
 - 2) Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengembangan pariwisata yang berkelanjutan di daerahnya.
- d. Bagi peneliti selanjutnya
- 1) Menjadi referensi dan masukan untuk penelitian lebih lanjut terkait dampak sektor pariwisata terhadap aspek-aspek lain, seperti sosial, budaya dan lingkungan.
 - 2) Menjadi sumber informasi dan inspirasi bagi penelitian-penelitian serupa di destinasi wisata lainnya.